

PERANCANGAN MARKAS PMI KOTA BANJARBARU

Aulia Rizky

Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat
2010812320021@mhs.ulm.ac.id

Rudi Hartono

Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat
rudi.hartono@ulm.ac.id

ABSTRAK

Markas PMI sebagai wadah operasional kepalangmerahan menjadi penyedia fasilitas kesehatan transfusi darah berupa Unit Donor Darah (UDD). Layanan darah yang diselenggarakan Palang Merah Indonesia diupayakan dapat memberikan akses pelayanan dengan lingkungan yang aksesibel bagi setiap orang. Hal ini guna mendukung salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Wilayah Ibukota Kalimantan Selatan, PMI Kota Banjarbaru menjadi salah satu organisasi dari perhimpunan nasional di bidang sosial kemanusiaan yang aktif beroperasi membantu masyarakat. Ditinjau dari ketersediaan wadah operasional, PMI Kota Banjarbaru nyatanya belum memiliki markas sebagai perangkat sarana dan prasarana kepalangmerahan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi PMI Kota Banjarbaru dalam bertugas. Akses pelayanan darah yang dibutuhkan masyarakat pun menjadi terhambat karena kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan transfusi darah. Maka dari itu, perancangan ini ditujukan untuk mendorong pemerintah agar dapat membangun dan meningkatkan efektivitas Markas PMI di masa mendatang. Melalui konsep *accessible building* dengan metode pendekatan arsitektur fungsional yang memperhatikan aspek lokalitas, diharapkan mampu menghasilkan rancangan "Markas PMI Kota Banjarbaru" yang aksesibel, inklusif dan efisien sehingga mampu mendukung fungsi markas dalam menyalurkan pelayanan yang diberikan.

Kata kunci: Markas, Palang Merah Indonesia, Fungsional, Desain Universal, Aksesibel

ABSTRACT

The PMI Headquarters as an operational forum for martyrdom is a provider of blood transfusion health facilities in the form of a Unit Donor Darah (UDD). The blood service organized by the Indonesian Red Cross strives to provide access to services with an accessible environment for everyone. This is to support one of the Sustainable Development Goals (SDGs) on health and welfare. In the capital region of South Kalimantan, PMI Kota Banjarbaru is one of the organizations of the national association in the field of social humanitarianism that actively operates to help the community. In terms of the availability of operational containers, PMI Kota Banjarbaru does not have a headquarters as a tool for humanitarian facilities and infrastructure. This is certainly a problem for PMI Kota Banjarbaru in its duties. Access to blood services needed by the community is also hampered due to the lack of availability of blood transfusion health facilities. Therefore, this design is intended to

encourage the government to build and improve the effectiveness of PMI Headquarters in the future. Through the concept of accessible building with a functional architecture approach that considers local aspects, it is hoped to produce a design for the “Markas PMI Kota Banjarbaru”, that is accessible, inclusive, and efficient, thus supporting the headquarters function in providing services.

Keywords: Headquarters, Indonesian Red Cross, Functional, Universal Design, Accessible

PENDAHULUAN

Layanan darah yang berkualitas menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* terhadap aspek kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*Good Health and Well Being*) (Puskesmas Bagu, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan transfusi darah yang berkualitas sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Layanan darah yang berkualitas dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam proses tindakan medis dengan tujuan penyembuhan dan pemulihan.

Menurut Standar Layanan Darah yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta hanya dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Pemerintah Indonesia secara khusus menunjuk Palang Merah Indonesia untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan perhimpunan nasional yang berlandaskan perikemanusiaan, yang beroperasi secara sukarela tanpa membedakan bangsa, golongan atau afiliasi politik. Dengan adanya peran Palang Merah Indonesia dalam upaya transfusi darah, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan darah yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), standar pasokan darah ideal adalah berkisar 2 persen dari total penduduk. Pada

tahun 2023, Palang Merah Indonesia mencatat sebanyak 77.438 kantong darah berasal dari Unit Donor Darah (UDD) di seluruh wilayah Indonesia seperti yang terlampir pada gambar 1.1. Hal ini tentunya belum memenuhi standar estimasi minimal darah yang berkisar 5,6 juta kantong, dan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.



Gambar 1. Stok Darah UDD PMI Tahun 2023
Sumber: PMI Pusat

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan transfusi darah. Salah satunya adalah bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah untuk menerapkan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan menyediakan fasilitas kesehatan berupa Unit Donor Darah di setiap Markas Palang Merah Indonesia. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan Palang Merah Indonesia yang bertanggung jawab atas penyediaan, pendistribusian, dan penyelenggaraan donor darah yang memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Palang Merah Indonesia, 2023). Ketersediaan UDD PMI di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga

mempengaruhi jumlah produksi darah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan beberapa wilayah masih menunggu upaya pemerintah dalam membangun Markas Palang Merah Indonesia sebagai wadah operasional.

Pada tahun 2008, sebagai hasil dari pemetaan wilayah Kabupaten Banjar, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendirikan PMI Kota Banjarbaru sebagai organisasi kemanusiaan yang membantu pemerintah dalam menjalankan tugas kepalangmerahan dan pelayanan darah di kota Banjarbaru (Aiman, komunikasi pribadi, 06 Oktober 2023). Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Banjarbaru pernah mengusulkan adanya upaya pembangunan Markas PMI Kota Banjarbaru, khususnya pada Unit Donor Darah. Namun, dikarenakan beberapa hal yang tidak diketahui, usulan itu belum direalisasikan hingga sekarang. Oleh karena itu, di masa sekarang perlu adanya upaya peningkatan pembangunan Markas PMI Kota Banjarbaru untuk menjamin ketersediaan dan kebutuhan produksi darah yang aman dan memadai.

PERMASALAHAN

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan transfusi darah di beberapa wilayah. Seperti hal nya PMI Kota Banjarbaru yang hingga saat ini masih belum memiliki wadah yang memenuhi fungsi sebagai tempat operasional kepalangmerahan dan pelayanan transfusi darah. Dengan adanya Markas PMI ditujukan untuk mewadahi fasilitas kesehatan dalam upaya pelayanan darah bagi masyarakat. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali kebutuhan Palang Merah untuk menunjang terselenggaranya pelayanan dengan baik, khususnya dalam ketersediaan wadah dan fasilitas yang memadai.

Adapun permasalahan arsitektural pada perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana merancang Markas PMI Kota Banjarbaru sebagai wadah operasional kepalangmerahan yang aksesibel, inklusif dan efisien, melalui pendekatan Arsitektur Fungsional?

TINJAUAN PUSTAKA

Objek perancangan merupakan Markas PMI sebagai wadah operasional kepalangmerahan dan pelayanan darah yang berfungsi memfasilitasi kebutuhan Palang Merah dan pengguna lainnya. Berikut penjabaran mengenai definisi objek untuk menyelaraskan persepsi terkait maksud dari perancangan:

A. Tinjauan Objek

1. Definisi Palang Merah Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia (PMI) adalah perhimpunan nasional yang berlandaskan perikemanusiaan dan beroperasi atas dasar kesukarelaan, tanpa membedakan bangsa, golongan atau afiliasi politik. Keberadaan Palang Merah Indonesia secara nasional telah diakui oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1950, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 Tahun 1963 (Palang Merah Indonesia, 2019). Pengakuan ini memberikan dampak positif pada perkembangan Palang Merah di Indonesia.

2. Definisi Markas Palang Merah Indonesia

Markas Palang Merah Indonesia (PMI) adalah perangkat dan sarana organisasi yang berfungsi untuk memfasilitasi Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan tugas kepalangmerahan dan pelayanan kesehatan baik secara administratif maupun operasional (Maudianti, 2020). Kedudukan Markas PMI sebagai sarana organisasi tidak terlepas dari tingkatan Perhimpunan PMI di masing-masing wilayah. Berdasarkan AD/ART PMI, Markas PMI dibagi menjadi tiga tingkat, Markas PMI Pusat berada di

tingkat nasional. Markas PMI Daerah di tingkat provinsi dan Markas PMI Cabang di tingkat kota/kabupaten. Markas PMI Kota merupakan pusat koordinasi dan komando yang mewadahi Palang Merah Indonesia di tingkat lokal. Keberadaan Markas PMI sangat mutlak diperlukan disuatu wilayah agar terwadahnya Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

3. Definisi Unit Donor Darah PMI

Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) merupakan bagian integral dari struktur dan operasional PMI di berbagai tingkatan, seperti provinsi, kabupaten atau kota. Hal ini menunjukkan bahwa UDD PMI umumnya memiliki keterkaitan erat dengan Markas PMI dan tidak dapat berdiri secara terpisah (Palang Merah Indonesia, 2021). Berikut beberapa peran Markas PMI dalam menyelenggarakan unit donor darah, yaitu:

- 1) Penyediaan infrastruktur dan fasilitas untuk UDD PMI
- 2) Mengembangkan kerjasama melalui kegiatan donor darah
- 3) Membantu pengembangan dan peningkatan pelayanan transfusi darah
- 4) Membantu dalam pengendalian dan pengelolaan stok darah di suatu wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan jejaring pelayanan Transfusi Darah, Unit Donor Darah PMI tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan peran dan kemampuan pelayanannya dapat dikategorikan pada kelas pratama.



Gambar 2. Standar Penataan Ruang Transfusi Darah Skala Pratama

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

4. Standar Lokasi dan Persyaratan Bangunan Markas PMI

Dalam perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru, standar persyaratan bangunan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan. Untuk Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2017, berdasarkan prinsip desain universal sebagai Bangunan Aksesibel yang dapat diakses oleh setiap orang. Adapun untuk regulasi bangunan dan tapak wilayah Kota Banjarbaru mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022.

5. Fungsi Manajemen Markas PMI

Fungsi manajemen Markas PMI berdasarkan elemen pelayanan Palang Merah sehingga didapat kebutuhan ruang. Fungsi manajemen Markas PMI membagi ruang yang didapat berdasarkan zoning ruang dan keterhubungan ruang untuk mempermudah sirkulasi dan efisiensi ruang.

No	Fungsi Administrasi	Fungsi Teknis Operasional	Fungsi Fasilitas
1.	Ruang Ketatausahaan	Pos Komando Markas	Ruang Utilitas
2.	Ruang Keuangan	Unit Donor Darah	Ruang Servis
3.	Gudang Logistik	Ruang Pelayanan sosial	Ruang Sirkulasi
4.	Ruang Kepegawaian	Ruang Pelayanan (Operator) Informasi dan Komunikasi	Ruang Kendaraan Terpadu (Parking)/Ruang Bebas Hambatan
5.	Ruang Dokumen dan Kearsipan	Aula Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Kepalaangmerahan	Area Penyimpanan Kendaraan (Parking Support)

Gambar 3. Zoning Ruang Markas PMI
Sumber: Analisis Pribadi

B. Tinjauan Arsitektural

1. Tinjauan Konsep *Accessible Building*

Menurut *The American Institute of Architects*, *Accessible* merujuk pada istilah desain yang menggambarkan elemen fisik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa *Accessible Building* merupakan sebuah konsep perancangan yang memperhatikan pengguna nya dalam menggunakan, menjangkau dan mengakses bangunan dengan baik dan mudah.

Bangunan Aksesibel mengacu pada prinsip desain Universal sebagai suatu metode atau pendekatan yang digunakan secara umum tanpa memandang usia, kecacatan dan faktor lain (Mubarak & Aqli, 2021). Berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, diantaranya meliputi:

- 1) Penggunaan prinsip desain universal *Appropriate size and space*, sebagai ukuran dasar ruang yang sesuai dan memadai. Hal ini menjadikan desain universal sebagai salah satu metode pemecahan masalah yang sesuai dengan konsep *Accessible Building*.
- 2) Perencanaan teknis dan konstruksi serta pemanfaatan bangunan dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang. Selain itu,

perencanaan juga harus memperhatikan aspek lokalitas yang ada pada lingkungan yang akan dibangun.

Menurut Ron Mace, terdapat 7 prinsip Desain Universal yang dapat dipahami secara sederhana (Martino, 2023), sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan Pengguna Ruang (*Equitable Use*): Setiap bentuk, fasilitas dan fungsi bangunan mampu memastikan kebutuhan setiap orang dengan kemampuan yang berbeda-beda
- 2) Kemudahan Akses tanpa Hambatan (*Flexibility in Use*): Desain dapat dijangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap orang
- 3) Sederhana dan Intuitif (*Simple and Intuitive Use*): Penggunaan desain yang sederhana dan sesuai kebutuhan, terlepas dari pengalaman, pengetahuan dan kemampuan setiap orang
- 4) Kemudahan Akses Informasi (*Perceptible Information*): Desain mudah dipahami dan mampu mengkomunikasikan, menginformasikan dan menginstruksi setiap orang secara efektif, terlepas dari kondisi lingkungan dan fisik pengguna
- 5) Keselamatan dan Keamanan Pengguna (*Tolerance for Error*): Desain bersifat toleran, memperhatikan keselamatan pengguna, mengurangi konsekuensi dan melindungi setiap orang
- 6) Efisiensi Upaya Pengguna (*Low Physical Effort*): Desain dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan fisik yang berlebihan
- 7) Kesesuaian ukuran/ruang secara ergonomis (*Appropriate size and*

space): Desain menjamin aksesibilitas, penggunaan ukuran ruang maupun fasilitas disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi fisik pengguna

2. Tinjauan Metode Arsitektur Fungsional

Secara spesifik, Arsitektur Fungsional adalah desain bangunan yang tidak hanya berfokus pada estetika tetapi pada fungsi dan kebutuhan bangunan itu sendiri berdasarkan permasalahan yang ada. Bentuk bangunan berdasarkan pendekatan arsitektur fungsional menyesuaikan penataan ruang dengan fungsi utama bangunan, sehingga dapat lebih efisien sesuai dengan teori *form, follow, function* (Richard & Roosandriantini, 2022). Adapun ciri-ciri Arsitektur Fungsional (Kurniawan, 2020) sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan Fungsi: Desain harus mencerminkan fungsi utama bangunan berdasarkan kebutuhan pengguna
- 2) Kesederhanaan Desain: Bentuk perancangan menyesuaikan kebutuhan fungsinya
- 3) Penggunaan Material: Memilih bahan yang sesuai dengan fungsi bangunan seperti pada kekuatan material dan kemudahan pemeliharaan bangunan
- 4) Keterhubungan Ruang (Organisasi Ruang): Bentuk dari perancangan merupakan implementasi dari fungsi dan kebutuhan. Batasan ruang harus jelas dan saling terhubung untuk memudahkan sirkulasi pengguna.

Adapun Organisasi Ruang dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya:

- a) Organisasi Terpusat: Ruang Primer dikelilingi ruang sekunder
- b) Organisasi Linier: Ruang disusun sejajar mengikuti garis lurus

- c) Organisasi Radial: Ruang digabung berdasarkan elemen terpusat dan linier
- d) Organisasi Cluster: Pengelompokan Ruang dengan fungsi yang sama namun dengan orientasi yang berbeda
- e) Organisasi Grid: Ruang disusun berdasarkan pola yang teratur dan sistematis

Arsitektur Fungsional beraliran modernisme yang berfokus pada kesederhanaan dan fungsi. Modernisme sendiri merupakan aliran yang mudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan material baru serta desain yang lebih efisien. Dalam konteks berkelanjutan, termasuk perubahan iklim, Arsitektur Fungsional juga mempertimbangkan efisiensi energi dan pengaruh lingkungan, sehingga tidak hanya menciptakan bangunan berdasarkan fungsi, tetapi juga fokus pada lokalitas dan keramahan lingkungan.

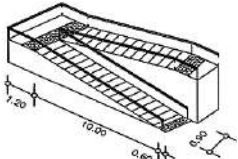
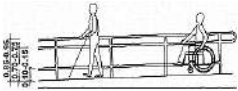
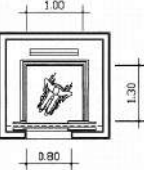
PEMBAHASAN

A. Analisis Fungsi

Analisis fungsi menerapkan metode pendekatan Arsitektur Fungsional dan penggunaan prinsip desain Universal, dimana desain bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keragaman penggunaannya sehingga dapat digunakan secara mandiri. Perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru membentuk sebuah bangunan "*Accessible*" yang mengikuti standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menurut Robinson, Aksesibilitas (*accessible*) mengacu pada kemudahan mencapai suatu wilayah ke wilayah lain dan kenyamanan akses fisik dalam menggunakan fasilitas

berdasarkan prinsip desain universal (Putra et al., 2024). Penggunaan desain yang simpel dan sesuai kebutuhan mampu memberikan kemudahan terlepas dari pengalaman, pengetahuan dan kemampuan setiap orang. Untuk menganalisis fungsi bangunan lebih mendalam, diperlukannya analisis yang lebih detail, sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Aksesibilitas

No	Judul	Item
1	Jalur Landai (Ramp) 	Kemiringan yang direkomendasikan 1:20, yaitu 5% dengan lebar min 0,90 m
2	Handrail (Pegangan Tangan) 	- Untuk penyangga disabilitas dan lansia pemasangan railing berkisar 0,85 m - 0,95 m diatas permukaan lantai
3	Lift 	Dapat menampung 1 kursi roda dengan dimensi minimum 1,00 m x 1,30 m
4.	Pintu  Pintu Geser otomatis: - Dilengkapi	Pintu Ayun: - 1 arah bukaan keluar dan memiliki visibilitas yang jelas, seperti penggunaan material kaca - Pintu diberi warna kontras

sensor gerak/tombol bukaan - Ruang bebas berukuran 152,5 cm x 152, cm	sebagai penanda untuk menjamin keamanan pengguna
--	--

sumber : Analisis Penulis

Selain penjabaran terkait kebutuhan aksesibilitas bangunan yang perlu diperhatikan terkait analisis fungsi adalah aktivitas pada elemen pelayanan PMI. Elemen Pelayanan PMI Kota Banjarbaru terdiri dari:

- 1) Divisi Kesehatan
- 2) Divisi Pelayanan
- 3) Divisi Bencana
- 4) Divisi Sumber Daya Manusia

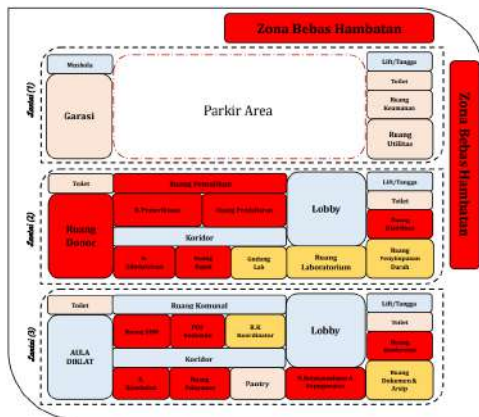
Dari aktivitas pelayanan PMI menghasilkan kebutuhan ruang yang menjadi acuan dalam perancangan. Kebutuhan ruang tersebut akan dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen Markas PMI sehingga melalui pendekatan Arsitektur Fungsional didapat efisien ruang terkait penggabungan fungsi yang berbeda ke dalam satu massa bangunan.

B. Analisis Bentuk dan Ruang

Kebutuhan ruang merupakan hasil dari aktivitas pengguna yang dapat menentukan dan mengatur keperluan ruang di dalam sebuah bangunan(Cekotechnology, 2020). Kebutuhan ruang pada perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru berdasarkan analisis fungsi pada elemen pelayanan dan kebutuhan pengguna. Kebutuhan ruang tersebut akan dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen Markas PMI yang disusun berdasarkan organisasi ruang sehingga didapat efisien ruang terkait penggabungan fungsi yang berbeda ke dalam satu massa bangunan. Pada perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru, pola organisasi ruang yang digunakan berupa organisasi grid dimana ruang

200

disusun secara sistematis dan teratur berdasarkan kelompok fungsinya.



Gambar 4. Organisasi Ruang berdasarkan kebutuhan ruang
Sumber: Analisis Pribadi (2020)

Adapun terkait bentuk dan massa bangunan Markas PMI Kota Banjarbaru menyesuaikan ketentuan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022 sebagai persyaratan bangunan. Selain itu penerapan konsep Arsitektur Tropis melalui pendekatan Arsitektur Fungsional sebagai tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan menjadi integrasi yang sangat relevan mengingat kondisi iklim di Indonesia dan pemenuhan kebutuhan fungsional Markas PMI serta anjuran dalam pembangunan yang mengharuskan perancangan memperhatikan unsur lokalitas.

C. Analisis Tapak

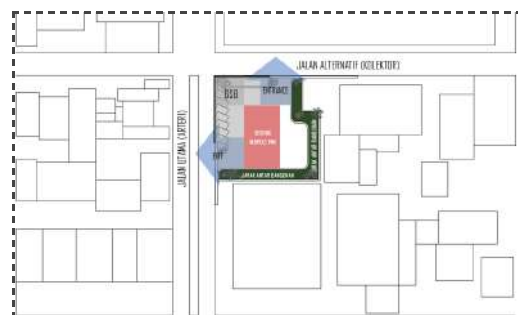
Desain bangunan dan lingkungan Markas PMI harus menjamin kemudahan akses yang bebas hambatan (*barrier free*) secara fisik dan non fisik serta mudah dipahami setiap pengguna dari berbagai kalangan. Selain itu penataan tapak juga direncanakan secara optimal berdasarkan fungsi bangunan dan ketentuan daerah yang

berlaku. Hal ini selaras dengan metode pendekatan Arsitektur Fungsional dan penerapan prinsip Desain *Universal*. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada tapak, berupa:

- 1) Kriteria Tapak berdasarkan Akses Pencapaian
- 2) Kriteria Tapak berdasarkan Zona Kawasan
- 3) Orientasi Bangunan dan Penataan Ruang Luar mengikuti kondisi Tapak guna mendukung sirkulasi dan pencahayaan yang baik
- 4) Pemenuhan fasilitas yang menunjang aksesibilitas pengguna

Adapun terkait data eksisting tapak sebagai site perancangan, yaitu:

- 1) Lokasi berada di Jalan Putri Junjung Buih, No.2, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
- 2) Luas Lahan berkisar $\pm 1218 \text{ m}^2$
- 3) Berada di zona kawasan Pemerintahan dan zona Komersil dengan tingkat kepadatan sedang
- 4) Tipologi tanah keras dengan sedikit kontur

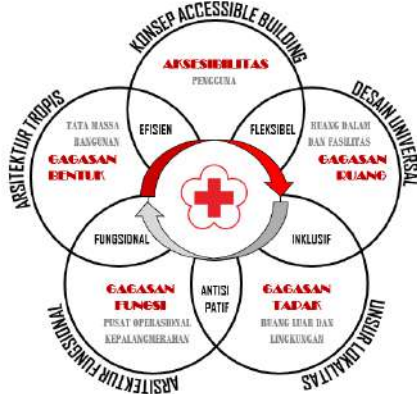


Gambar 5. Analisis Tapak Markas PMI Kota Banjarbaru
Sumber: Google Maps

D. Konsep Rancangan

Dalam konteks perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru, konsep programatik menjadi panduan perencanaan yang melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan

fungsiional markas dan aksesibilitas pengguna. Hal ini menjadikan konsep *Accessible Building* melalui pendekatan Arsitektur Fungsional sebagai konsep yang sesuai dalam memenuhi dua aspek tersebut.



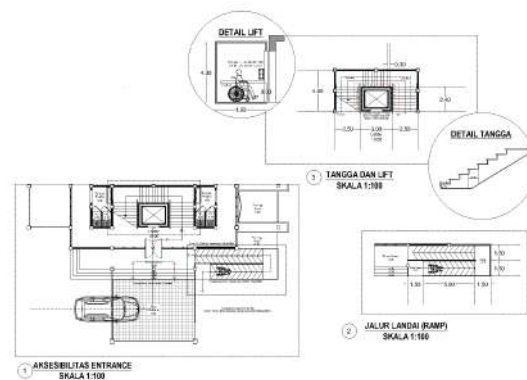
Gambar 6. Konsep Perancangan
Sumber: Analisis Pribadi

1. Konsep Fungsi

Secara umum, pendekatan arsitektur Fungsional diartikan sebagai pendekatan desain yang mengutamakan fungsi dan kegunaan dari bangunan dalam perancangan (Zahra, 2021). Hal ini selaras dengan fungsi Markas PMI Kota Banjarbaru sebagai wadah operasional kepalangmerahan yang mampu memberikan akses bagi setiap orang. Bangunan Markas PMI harus dapat memfasilitasi berbagai jenis kebutuhan pengguna dan fasilitas terkait aksesibilitas yang mampu mendukung fungsi manajemen Markas. Adapun aspek penting Arsitektur Fungsional yang diterapkan pada perancangan, berupa:

- 1) Kebutuhan Pengguna: Memprioritaskan fungsi yang dibutuhkan, terutama kebutuhan ruang dan fasilitas aksesibilitas pengguna
- 2) Efisiensi Ruang: Mengoptimalkan penggunaan ruang
- 3) Desain Minimalis: Bentuk bangunan tergantung pada fungsi dengan

penekanan kesederhanaan dan tampilan yang bersih



Gambar 7. Penerapan Aksesibilitas pada perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru
Sumber: Analisis Pribadi

2. Konsep Bentuk dan Ruang

Konsep ruang dirancang berdasarkan pendekatan Arsitektur Fungsional, dimana mengacu pada pengoptimalan penggunaan ruang dan ukuran ruang dengan proporsi yang sesuai. Ruang dibagi berdasarkan fungsinya, seperti ruang publik, semi-publik, privat dan servis. Hal ini diterapkan untuk membantu penataan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Selain itu, penataan ruang berfokus pada keterhubungan fungsi ruang melalui penerapan organisasi ruang. Kebutuhan ruang pada Markas PMI Kota Banjarbaru disusun secara sistematis berdasarkan sistem zoning. Zona bebas hambatan terletak di lantai dasar dengan metode *Freeplan*. Sedangkan untuk zona teknis operasional berada pada lantai dua, hal ini mempertimbangkan akses pengunjung yang memiliki hambatan gerak sehingga dapat menjangkau fasilitas pelayanan darah dengan mudah. Untuk kantor sebagai zona administrasi diletakan pada lantai teratas dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang.



Gambar 8. Penataan Ruang berdasarkan organisasi ruang
Sumber: Analisis Pribadi

Adapun terkait penerapan konsep bentuk dan massa bangunan mengadaptasi bentuk dasar geometri sederhana yaitu persegi panjang dengan satu massa bangunan dengan orientasi memanjang mengikuti orientasi dan kondisi tapak. Selain itu bentuk bangunan juga terinspirasi dari bentuk logo Palang merah Indonesia, sebagai implementasi dari karakteristik Palang Merah itu sendiri. Untuk konsep bentuk bangunan menerapkan konsep Arsitektur Tropis melalui pendekatan arsitektur fungsional. Integrasi keduanya mengacu pada perancangan bangunan berdasarkan fungsi dan kondisi iklim serta pemenuhan kebutuhan pengguna dalam mengakses bangunan dan lingkungan sekitar.



Gambar 9. Penerapan konsep Arsitektur Tropis pada bentuk bangunan
Sumber: Analisis Pribadi

3. Konsep Tapak

Penggunaan konsep *Accessible Building* pada perancangan tapak Markas PMI Kota Banjarbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 tahun 2022 yang sehubungan dengan penerapan aspek lokalitas. Konsep ini memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses bangunan dengan tetap mengikuti regulasi kawasan yang telah ditetapkan. Konsep ini juga bertujuan menciptakan lingkungan yang dapat mengadopsi berbagai keperluan pengguna di masa sekarang maupun yang akan datang. Beberapa konsep yang diterapkan pada tapak, sebagai berikut:

- 1) Akses Keluar-masuk yang berbeda, untuk meningkatkan keamanan pengguna
- 2) Akses ketercapaian yang mudah dikarenakan kawasan berada di pusat kota
- 3) Adanya area terbuka hijau menyesuaikan kebutuhan dan fungsi bangunan sebagai bagian dari desain ramah lingkungan
- 4) Lahan parkir yang mudah diakses, berdekatan dengan bangunan dilengkapi dengan Pos Keamanan
- 5) Terdapat beberapa fasilitas aksesibilitas sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan fungsi bangunan



*Gambar 10. Konsep Tapak Markas PMI Kota Banjarbaru
Sumber: Analisis Pribadi*

HASIL

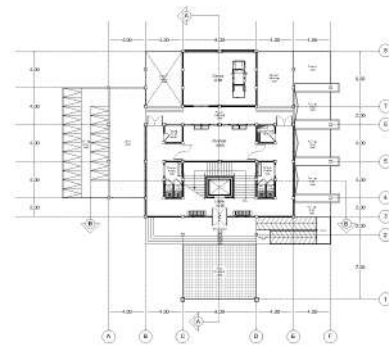
Hasil dari perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru berupa gambar desain yang merupakan solusi pemecahan masalah terkait kebutuhan wadah operasional kepalangmerahan dan pelayanan transfusi darah di Kota Banjarbaru. Berikut beberapa gambar desain perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru, diantaranya:

A. Rencana Tapak

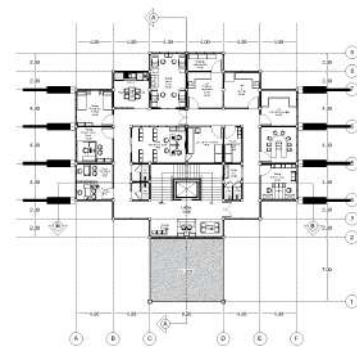


*Gambar 11. Rencana Tapak Markas PMI Kota Banjarbaru
Sumber: Analisis Pribadi*

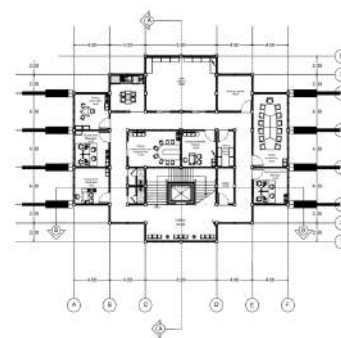
B. Denah



*Gambar 12. Penataan Ruang pada zona fasilitas / freepan berdasarkan organisasi ruang grid
Sumber: Analisis Pribadi*



*Gambar 13. Penataan Unit Donor Darah pada zona teknis operasional berdasarkan organisasi ruang grid
Sumber: Analisis Pribadi*



*Gambar 14. Penataan Ruang Kantor pada zona administrasi berdasarkan organisasi ruang grid
Sumber: Analisis Pribadi*

C. Tampak



Gambar 15. Tampak Bangunan
Sumber: Analisis Pribadi



Gambar 16. Perspektif bangunan
Sumber: Analisis Pribadi

KESIMPULAN

Markas PMI menjadi salah satu perangkat dan sarana organisasi kemanusiaan yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup disuatu wilayah. Perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru dengan asas aksesibilitas merupakan upaya dalam menciptakan bangunan yang inklusif dan berdaya guna sehingga memperkuat peran PMI Kota Banjarbaru dalam membantu sesama. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat operasional kepalangmerahan, Markas PMI Kota Banjarbaru juga menjadi salah satu wadah fasilitas kesehatan donor darah yang mampu menunjang kebutuhan masyarakat luas. Tentunya, perancangan ini disesuaikan

dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dari setiap lapisan masyarakat, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan fisik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam perancangan Markas PMI Kota Banjarbaru yaitu *Bagaimana merancang Markas PMI Kota Banjarbaru sebagai wadah operasional kepalangmerahan yang aksesibel, inklusif dan efisien melalui pendekatan arsitektur fungsional?* Solusi yang diberikan berupa gagasan bentuk yang mengadopsi prinsip desain dari pendekatan Arsitektur Fungsional dan penerapan Desain Universal dengan mengedepankan fungsi Markas PMI. Hal ini menjadikan Markas PMI Kota Banjarbaru sebagai bangunan dengan konsep *Accessible* yang mampu mendukung kebutuhan setiap pengguna dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku dan Jurnal

- Kurniawan, A. (2020). *Projek Akhir Arsitektur. Wisata Alam Taman Hutan Raya Tinjomoyo Semarang.*
- Maudianti, N. (2020). *Perancangan Ulang Interior Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung.* Universitas Telkom.
- Mubarak, Z., & Aqli, W. (2021, Maret 1). *Jurnal Arsitektur PURWARUPA. PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR UNIVERSAL PADA PUSAT HIBURAN DUNIA FANTASI.*
- Putra, M. D. A., Al Husaini, M. A., Susilawaty, M. D., & Rizal, M. (2024, Februari 3). *Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities. Perancangan Terminal Penumpang Pelabuhan Internasional Tanjungbalai Karimun Dengan Pendekatan Eco-Technology Architecture, 1, 102-113.*
- Richard, B., & Roosandriantini, J. (2022, November). *Kolaborasi Jurnal Arsitektur. Penerapan Arsitektur Futuristik dan Fungsionalis pada bangunan Museum Le Grande Louvre, 2.*
- Zahra, F. (2021). *Tugas Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Nasional. Rancangan Kantor Pemerintahan BAPPEDA Provinsi Jawa*

Website

- Ceko Technology. (2020). Cara Menentukan Kebutuhan Ruang Pada Bangunan Agar Representatif - Jasa Arsitektur dan Konstruksi Baja. Jasa Arsitek dan Konstruksi Baja. <https://arsitekta.com/>
- Kementerian Kesehatan. (2014). Permenkes No. 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. PERATURAN.GO.ID. Retrieved March 7, 2024, from <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-83-tahun-2014>
- Kementerian Kesehatan. (2022). Permenkes No. 40 Tahun 2022. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245559/permenkes-no-40-tahun-2022>
- Martino, G. (2023, January 2). What is Universal Design? ArchDaily. Retrieved November 12, 2023, from <https://www.archdaily.com/994337/what-is-universal-design>
- Palang Merah Indonesia. (2019, Maret 09). Sejarah Singkat Palang Merah Indonesia. Tentang PMI. <https://www.pmi.or.id/tentang-pmi/>
- Palang Merah Indonesia. (2023, Januari 30). Profil UDD PMI. Unit Donor Darah Pusat PMI. <https://uddpmi.or.id/>
- Puskesmas Bagu. (2022, September 14). STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN DARAH DI LOMBOK TENGAH OLEH UNIT TRANSFUSI DARAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Puskesmas Bagu. Retrieved February 20, 2024, from <https://puskesmasbagu.lomboktengahkab.go.id/berita/strategi-pemenuhan-kebutuhan-darah-di-lombok-tengah-oleh-unit-transfusi-darah-dinas-kesehatan-kabupaten-lombok-tengah>
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran RI Nomor 6180. <https://www.kemhan.go.id/>